

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan

Dewi Walahe

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gorontalo

dewi.walahe31@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to find out the factors that influence the improvement of the family of hope program in Tapa Subdistrict, Bone Bolango District. This article uses a qualitative approach, the writer also functions as the main instrument that plunges the field and tries to collect data through observation and interviews and interviews. In drawing conclusions the author uses the inductive method to draw events from the data that has been collected that can be generalized, then clearly this inductive method to assess empirical facts that are found and then matched with existing theories. The results of this paper show that communication is very important in achieving the goals of the Implementation of the Family Hope Program in Tapa District. Effective implementation occurs when decision makers already know what they are going to do. The knowledge they will do can work well if the communication goes well. So the implementation of the program must be well communicated to the parties concerned. Furthermore the resource factor also has a very important influence. The availability of resources in implementing a program is one factor that must always be considered. In this case the resources in question are human resources, financial resources, and time resources to support the implementation of the family of hope program in the District of Tapa. Furthermore, one of the factors influencing the effectiveness of policy implementation is the attitude of the implementor.

Keywords: Performance; Family Hope Program

ABSTRAK

Arikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan program keluarga harapan di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, penulis sekaligus berfungsi sebagai instrument utama yang terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan data melalui observasi maupun wawancara dan interview. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tapa. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah menengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait. Lebih lanjut faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan.

Kata Kunci: Kinerja; Program Keluarga Harapan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mendekati angka 260 juta penduduk menjadikan kemiskinan menjadi fenomena yang jelas terlihat di Indonesia, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks dan multidimensional, yang ditandai dengan keberadaan pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak mendasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menalani kehidupan secara bermartabat. Oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan khusus oleh pemerintah untuk dapat mengurangi angka kemiskinan di setiap tahunnya. Dimana faktor pendidikan dan kesehatan harus menjadi instrumen yang harus dibenahi.

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, menjelaskan bahwa tingkat ketimpangan atau gini ratio tahun 2018 hanya mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun 2017. Dalam dua tahun terakhir tingkat ketimpangan turun, seperti pada tahun 2017 sebesar 0,400 menjadi 0,348 pada tahun 2018. "Begitu pun dengan angka kemiskinan, Kabupaten Bone Bolango hanya mengalami penurunan 0,41 persen dalam 3 tahun terakhir. Khusus untuk Kecamatan Tapa secara faktual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga di Kecamatan Tapa terikat erat dengan kesehatan dan pendidikan. Rendah dan lemahnya penghasilan rumah tangga dibawah garis kemiskinan menyebabkan rumah tangga tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Seperti pemeliharaan ibu hamil, karena tidak mencukupi penghasilan maka ibu tersebut tidak perlu diperikasakan secara rutin ketempat pelayanan kesehatan dan pada akhirnya akan mengakibatkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan. Selain itu, ada juga anak yang sakit menyebabkan prestasinya rendah dan jarang masuk sekolah serta dapat menyebabkan putus sekolah. Kondisi itulah yang berdampak buruk pada melemahnya daya tahan tubuh dan produktivitas seseorang serta tetap pada siklus pendidikan dan kesehatan yang buruk serata tetap berada dalam garis kemiskinan yang tidak dapat diputuskan.

Dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 melaksanakan program keluarga harapan atau dikenal dengan sebutan PKH. PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat (*Conditional cash transfer* "CCT) kepada rumah tangga miskin (RTSM) berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Karakteristik utama program bantuan tunai bersyarat ini adalah mensyaratkan perilaku yang harus dilakukan oleh penerima bantuan yaitu menjaga sumber manusia (SDM), seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi anak-anak.

PKH bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program bantuan sebelumnya seperti subsidi langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, tetapi PKH lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang sampai saat ini banyak diadopsi oleh banyak Negara sebagai strategi program bantuan sosial, karena karakteristik

utama program bantuan ini adalah mensyaratkan perilaku yang harus dilakukan oleh penerima bantuan program.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Gorontalo mulai diberlakukan pada tahun 2007 yang meliputi enam Kabupaten/Kota yakni Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, Pohuwato, Boalemo dan Kota Gorontalo sebagai daerah percontohan yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan total 18 kecamatan. Tiga daerah tersebut dijadikan salah satu daerah sasaran Program Keluarga Harapan mengingat jumlah penduduk miskin di daerah ini masih cukup banyak. Menurut data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai 21,3 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Kondisi kemiskinan ini menyebabkan banyak keluarga miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan secara layak.

Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung, penghambat, dampak positif dan dampak negative dari pelaksanaan program. Faktor pendukung misalnya mekanisme implementasi PKH yang jelas, adanya kerjasama yang baik diantara pihak terkait, dan lain sebagainya. Faktor penghambat seperti masih banyak rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang belum tersedia oleh BPS, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum memadai dan lain sebagainya. Dampak positif misalnya terjadi peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak usia SD dan SMP dari RTSM, meningkatnya status kesehatan ibu dan anak RTSM, dan lain sebagainya. Terakhir adalah dampak negative seperti pengalihan bantuan oleh penerima untuk kegunaan kebutuhan lain diluar pendidikan dan kesehatan, timbul peluang dari oknum petugas untuk menyalahgunakan bantuan dan timbul kecemburuan social dikalangan masyarakat karena ada sebagian RTSM yang tidak mendapatkan bantuan.

PKH merupakan bentuk program yang bertujuan untuk kemaslahatan dan membantu kesejahteraan umat. Bantuan yang diberikan merupakan bentuk perwujudan saling tolong menolong antar sesama manusia. Oleh karena itu dalam melaksanakan program PKH kepada kelompok sasaran penerima bantuan program. Hal tersebut bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan bersama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi anak-anak serta upaya memutuskan rantai kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tapa dimulai sejak Tahun 2007. Daerah ini menjadi sasaran bantuan PKH karena berdasarkan data BPS Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang termasuk rumah tangga miskin sangat banyak, antara lain dari keluarga di kecamatan Tapa, jumlah keluarga miskin sebanyak 422 rumah tangga, sedangkan sisanya rumah tangga merupakan keluarga menengah. Beberapa keluarga miskin tersebut ada yang dikategorikan sebagai rumah tangga sangat miskin. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pendamping PKH menunjukkan bahwa terdapat 422 rumah tangga di Kecamatan Tapa yang masuk kategori RSTM. Hal ini dijelaskan pula oleh pemerintah setempat bahwa kecamatan Tapa merupakan daerah yang masih memiliki tingkat masyarakat miskin yang masuk dalam program PKH. Karena melihat realitas masyarakat masih banyak rumah tangga miskin yang tidak mampu untuk menyekolahkan

anak-anaknya dan kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan balita, terutama pada rumah tangga yang sangat miskin.

Adapun yang menjadi besaran bantuan untuk setiap RSTM peserta PKH tidak dismarkan, bantuan yang di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Indeks Bantuan PKH

Indeks Bantuan	Bantuan per RSTM per tahun
1. Bantuan Tetap	240.000
2. Bantuan bagi RSTM/KSM yang memiliki: a. Anak usia di bawah 6 tahun atau b. Ibu hamil/menyusui	1.000.000
3. Anak peserta pendidikan setara SD/MI	500.000
4. Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs	1.000.000
5. Rata-rata bantuan per RSTM/KSM	1.800.000
6. Bantuan minimum per RSTM/KSM	800.000
7. Bantuan maksimum per RSTM/KSM	2.800.000

Sumber: SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial No.121/LJS/06/2013

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:510), “pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya”. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa pemberdayaan bukan sekedar menolong orang miskin agar menjadi tidak miskin. Pengertian pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri, dapat mengendalikan masa depannya dan bahkan dapat mempengaruhi orang lain.

Senada dengan Ife dan Tesoriero dalam Manullang (2008) mengatakan bahwa pada intinya pengertian pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. (Manullang 2008: 78 – 79) mengatakan bahwa tujuan dan target pemberdayaan bisa saja berbeda, misalnya di bidang ekonomi, pendidikan atau kesehatan. Pemberdayaan juga bisa bervariasi dalam pembangunan sehingga pemberdayaan di suatu bidang bisa berbeda dengan bidang lainnya.

Dari pengertian dan indikator-indikator tersebut, penulis berpendapat bahwa pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu 1) dari tidak berdaya menjadi berdaya, 2) setelah berdaya kemudian menguat dan 3) setelah menguat lalu dikembangkan. Pekerjaan sosial dalam upaya pemberdayaan tidak berhenti pada pencapaian kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetapi lebih pada peningkatan kapasitas individu tersebut agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Oleh karena itu penulis tertarik menulis artikel yang berfokus pada

faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja pendamping program keluarga harapan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu untuk mencari kebenaran secara ilmiah dan memandang obyek secara keseluruhan, interpretasi berdasarkan atas fenomena alamiah dan akan digunakan sebagai dasar untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil penelitian. Pemilihan instrument penelitian yaitu jumlah sampel digunakan sebagai tambahan informasi.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sebagaimana yang dikutip Lexi J. Moeleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder.1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari narasumber atau informasi yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan; 2) Data sekunder adalah sebagian data pendukung data primer dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau instansi dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Teguh, 2004: 80-81), dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Teguh (2004: 80-81) mengatakan pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada padapembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas

pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Teguh, 2004: 80-81).

Dalam menganalisis kinerja, variabel pelatihan, fasilitas dan protap secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Irdja, 2018). Adapun kinerja pendamping dalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Tapa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam artikel ini menggunakan teori Edward III yaitu sebagai berikut:

Faktor Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tapa. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah menengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut.

Komunikasi didalam implementasi suatu program merupakan hal yang penting. Dalam meneruskan pesan pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud maksud kebijakan.

Faktor Sumberdaya

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk mendukung jalannya implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Tapa

Faktor Disposisi

Disposisi yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terhadap program. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap imlementor. Jika imlementor setuju dengan bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Maka, biasanya ditempuh penyelesaian ataupun antisipasi dengan upaya penempatan pegawai sesuai dengan dedikasi dan bidangnya, serta pemberian insentif

Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam pelaksanaan suatu kenijakan terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi.

Menurut pandangan Ife (208: 331) Indikator keberhasilan yang diakui untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup: 1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan. 2) Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan. 3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. 4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program. 5) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan. 6) Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah. 7) Meningkatkan kapasitas skala partisipasi masyarakat. 8) Berkurangnya masyarakat yang menderita. 9) Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan mutu hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tapa mendapat dukungan dari berbagai pihak kecamatan, desa, dan antusiasme masyarakat menengenai program ini cukup tinggi. Meski demikian, ini belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat; jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (*skill*) sehingga belum bisa dikatakan maksimal.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) belum optimal. Hal ini terutama terlihat dari, Komunikasi, setelah melakukan penelitian bahwa komunikasi dalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Sesenapadang masih belum maksimal. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan spanduk sehingga informasi tentang program keluarga harapan sampai ke pelosok pelosok desa. Sumberdaya sudah cukup baik namun dalam hal ini sumberdaya manusia perlu ditingkatkan lagi. Disposisi dalam ini masih kurang dalam aspek insentif sehingga perlu untuk ditambahkan. Struktur birokrasi masih terkendala dalam

dalam aspek fragmentasi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik itu masyarakat yang menjadi sasaran bantuan maupun pelaksana program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus Salim, 2002. *Perubahan sosial: Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Irdja, A. M. (2018). Faktor-Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 2(2), 19-22.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1997, *Administrasi Pembangunan: Perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*, Pustaka LP3ES , Jakarta.
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangn Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.